# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## **Literatur Reviu**

Dalam sebuah karya ulis ilmiah, terutama dalam hal ini skripsi, tidak ada yang bersifat asli (*original*) dan benar-benar baru dihasilkan oleh penulis, dimana penelitian tersebut tidak terlepas dari pengaruh peneletian yang berkaitan dengan peneletian yang sedang dilakukan oleh penulis. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian ini penulis merasa penting untuk .meninjau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan ‘Implikasi Krisis Pengungsi di Eropa Terhadap Kebijakan Luar Negeri Hungaria’.

Penelitian yang pertama penulis jadikan sebagai tinjauan adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Rizka Cynthia Debi dengan judul “Upaya UNI Eropa Dalam Menangani Krisis Pengungsi Dari Suriah Di Kawasan Eropa Melalui EASO (*European Asylum Support Office).*

Dalam peneletian tersebut, Rizka menyebutkan bahwa dalam menangani krisis pengungsi di Eropa, upaya yang telah dilakukan oleh Uni Eropa, seperti program pengelolaan imigrasi pada Agenda Migrasi Eropa yang hanya berlandaskan solidaritas dan rasa saling percaya antar sesama anggota Uni Eropa, pencarian dan penyelamatan migran yang terombang-ambing di laut bersama Frontex dan pembentukkan EASO (*European Asylum System Office*) yang mengaplikasikan sistem suaka CEAS (*Common European Asylum System*) untuk melakukan kerjasama dengan negara-

negara anggota Uni Eropa dalam memberikan perlindungan para imigran, melakukan relokasi pemukiman dan membantu para imigran dalam membantu pencarian suaka.

Meskipun begitu, upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam mengatasi krisis imigran tersebut tidaklah mudah. Hambatan demi hambatan terus menghantui upaya yang dilakukan Uni Eropa, diantaranya seperti terus melonjaknya jumlah imigran yang mengajukan perlindungan ke wilayah Eropa. Contohnya saja pada tahun 2014 peningkatan jumlah imigran yang datang ke Eropa melonjak sebesar 43% dari tahun sebelumnya. Hambatan selanjutnya adalah, negara-negara anggota Uni Eropa yang melakukan sekuritisasi terhadap negaranya dalam menerima imigran. Hal ini dilakukan oleh beberapa negara-negara di Uni Eropa untuk mempertahankan kepentingan nasional negaranya masing-masing, contohnya yang paling terlihat dalam menolak imigran adalah Hungaria. Sehingga hal ini menyulitkan EASO untuk menjalankan tugasnya.

Literatur selanjutnya adalah penelitan kuantitatif berjudul “*Refugees, not Economic Migrant – Why do Asylum-Seekers Register in Hungary*” yang dilakukan oleh Andŕas Tétényi, Tamas Barczikay dan Balazs Szent-Ivanyi pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong para imigran dalam mengajukan suaka terhadap Hungaria. Mereka menyebutkan bahwa pengajuan suaka di Uni Eropa pada tahun 2000-an relatif cukup stabil, namun mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2010 hingga 2016, pada tahun 2015 ada sebanyak 1.322.845 permohonan suaka terhadap negara-negara Uni Eropa. Mereka juga menyebutkan bahwa peningkatan ini mempengaruhi kepentingan nasional tidak hanya di Eropa Barat namun juga negara-negara di Eropa Tengah dan Timur, terutama Hungaria yang mencapai angka 82.7% dari seluruh permohonan di wilayah Eropa Tengah dan Timur.

Mereka menyebutkan bahwa dalam penelitian ini terdapat dua fokus pembahasan. Pertama untuk menjelaskan mengapa para pencari suaka dalam jumlah besar memilih Hungaria sebagai negara tujuannya, dengan memeriksa faktor-faktor pendorong pencari suaka dalam memilih Hungaria. Seperti letak geografis Hungaria yang bertepatan dengan jalur migrasi Balkan (Setidaknya sampai pembangunan pagar perbatasan Hungaria-Serbia pada tahun 2015) (Baznec, 2016) dan (Arsenijevic et al, 2017). Lalu ada faktor-faktor lain selain letak geografisnya seperti lemahnya pengawasan di perbatasan, perbedaan hasil pendapatan antara negara asal dan Hungaria, kebijakan negara tujuan terhadap pengungsi dan masih banyak faktor lainnya. Karena banyaknya faktor dan penelitian yang saling kontradiksi, Andras dkk menyimpulkan bahwa masih ada ketidakjelasan mengenai faktor yang mendorong pengungsi memilih Hungaria sebagai suaka.

Yang kedua, penelitian ini untuk menguji apakah orang yang mendaftarkan diri sebagai pencari suaka di Hungaria adalah benar-benar pengungsi. Pada tahun 2015, pemerintah Hungaria yang dipimpn oleh partai populis-konservatif Fidesz, mengklaim bahwa imigran yang datang ke Hungaria itu sebenarnya adalah “tenaga kerja asing illegal” (The Guardian, 2015). Para peneliti menyebutkan bahwa pernyataan pemerintah Hungaria hanyalah pembenaran untuk melakukan pengetatan di wilayah perbatasan, termasuk pembangunan pagar listrik di sepanjang perbatasan Serbia-Hungaria dan memberikan perlakuan yang lebih keras terhadap para pencari suaka yang dating.

Hasil dari penelitian ini menghasilkan jawaban dari apa yang menjadi faktor pencari suaka dalam memilih Hungaria sebagai negara tujuan dan validitas pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa imigrasi yang mendaftar sebagai pencari suaka di Hungaria bukanlah pengungsi, namun “tenaga kerja asing ilegal”.

Terlepas dari klaim yang dikeluarkan pemerintah Hungaria, penelitian ini jelas menunjukkan bahwa klaim yang dikeluarkan oleh pemerintah Hungaria yang menyebutkan pencari suaka adalah “tenaga kerja asing ilegal” dan bukan orang yang melarikan diri dari konflik adalah salah. Faktor ekonomi bukanlah faktor yang mendorong pencari suaka dalam menentukan negara tujuan, melainkan melarikan diri dari konflik yang terjadi di negara asal dari pencari suaka. Hasil ini sejalan dengan pandangan komis Eropa yang menemukan pelanggaran prosedur di Hungaria. Komisi juga menemukan bahwa Hungaria tidak mematuhi ‘*Asylum Procedur*” yang tercantum dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union* (European Commision, 2017).

Mereka menyimpulkan bahwa faktor pencari suaka memilih Hungaria adalah sebagai negara transit untuk masuk ke wilayah Eropa, bukan karna perbedaan GDP seperti yang disebutkan oleh pemerintah Hungaria. Terlepas dari segala bentuk kebijakkan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hungaria, selama masih adanya konflik dan kekerasan di negara asal, pencari suaka akan terus mengajukan status pengungsi di Hungaria.

Penelitian selanjutnya adalah “*Controlling irregular migration: International human rights standards and the Hungarian legal framework*” yang ditulis oleh Daniel Gyollai dan Anthony Amatrudo. Pada penelitian ini kedua peneliti membahas krisis pengungsi dan migran dari kacamata hukum internasional. Mereka membahas tentang hukum dalam negeri Hungaria yang mengadopsi tindak kriminal baru, mengenai prosedur imigrasi yang membatasi akses kepada penentuan status pengungsi dan mengabaikan kebijakan suaka Uni Eropa. Dalam mencegah masuknya migran ke wilayahnya, Hungaria melakukan pencegahan secara *de facto*.

Penelitian ini menemukan adanya perampasaan hak asasi manusia yang menjadi realita sehari-hari di wilayah perbatasan, lalu adanya penolakan dari negara-negara Uni Eropa dalam menerapkan Regulasi Dublin, penolakkan ini dimaksudkan agar para migran tidak masuk ke Hungaria dan masukknya Hungaria kedalam negara anti Rawlsian akibat perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan migran. Kasus ini mengindikasikan bahwa diskusi mengenai *European Agenda on Migration* masih kurang dalam menjadikan Bahasa Eropa menjadi bahasa umum. hal ini dikarenakan masih adanya beberapa negara yang terkurung dalam ‘*fortress europe*’. Berhasilnya proses marginalisasi standar hak kemanusiaan dalam level kawasan membuat integrasi Eropa menjadi rusak. Sehingga secara kerangka nasional dan Uni Eropa, hukum tersebut sifatnya menjadi menghukum ketimbang melindungi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kerangka hukum di Hungaria mempengaruhi integrasi migran dan pengungsi yang masuk ke dalam negara. Pembahasan kriminologi dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana mekanisme hukum internasional dan kerangka kerja yang sudah ada melindungi pencari suaka yang ditolak pengajuan suaka nya. Penelitian ini menyimpulkan perlakuan Hungaria mampu mengancam stabilitas kawasan dan memicu kriminalisasi dan eksploitasi terhadap pengungsi yang merupakan kelompok manusia paling rentan di dunia.

## Kerangka Konseptual

Untuk membantu proses penelitian, tentu diperlukan adanya landasan guna memperkuat analisa. Maka dari itu dalam melakukan analisa masalah yang diangkat, diperlukan adanya landasan teori ataupun kerangka konseptual yang relevan. Dalam menganalisa permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, penulis memakai teori dan konsep yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan teori yang paling popular guna menganalisa fenomena dalam hubungan internasional, baik dalam mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan pola interaksi para aktor hubungan internasional. Donald E. Neuchterlein memberikan definisi dari konsep kepentingan nasional sebagai kepentingan yang dirasakan dan diinginkan oleh negara yang berdaulat yang mencakup pola lingkungan eksternalnya.

Neuchterlein mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi empat yaitu kepentingan pertahanan dan keamanan (*defence interest),* kepentingan ekonomi (*economy interest*), tata internasional (*internasional order*) dan kepentingan ideologi (*ideological interest*) (Bakry, 1999). Kepentingan pertahanan dalam Neuchterlein menyangkut tentang kepentingan untuk melindungi keamanan wilayah serta warga negaranya dari ancaman negara lain. Selanjutnya kepentingan ekonomi merupakan kepentingan yang dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatan ekonomi negaranya dengan menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain. Ketiga, kepentingan tata internasional yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan system internasional yang menguntungkan bagi negaranya, Terakhir, kepentingan ideologi merupakan kepentingan untuk melindungi atau mempertahankan ideologi suatu negara dari ancaman pengaruh ideologi negara lain.

Pada substansi pertahanan dan keamanan, Nuechterlein memberikan penekanan bahwa ancaman dan bahaya dari pihak luar sangatlah besar, terutama apabila *sense of defence* negara tersebut sudah hilang. Dalam menjaga nilai inti kepentingan suatu negara, pertahanan dan keamanan memiliki peran yang penting, strategi pertahanan dan keamanan pun dapat mendukung kebijakan ekonomi serta kebijakan luar negeri dalam persaingan ekonomi global. Kepentingan ekonomi, ideologi dan tata internasional akan mampu dikawal oleh negara yang memiliki pertahanan dan keamanan yang kuat.

Nuechterlein menganggap bahwa kepentingan ekonomi merupakan salah satu nilai inti dari kepentingan nasional sebuah negara, kepentingan yang dimaksud adalah pemeliharaan kerangka politik dan ekonomi internasional dimana negara merasa aman, serta warga negara dan system perdagangannya terlindungi diluar batas negara. Dan pada kepentingan ideologi, Nuechterlein menjelaskan bahwa setiap harus menjaga keutuhan ideologinya dari ancaman pihak luar, karena ideologi merupakan identitas sebuah negara yang memuat prinsip dan gagasan yang menentukan jati diri sebuah Negara (Nuechterlein, 1979).

### Kebijakan Luar Negeri

Secara umum kebijaka luar negeri merupakan salah satu pedoman bagi suatu negara-bangsa dalam bertindak di lingkungan eksternalnya. Tidak hanya itu, kebijakan luar negeri juga diartikan sebagai suatu komitmen dasar dalam bentuk strategi untuk mencapai kepentingan luar negeri maupun dalam negeri di isu-isu internasional. Selanjutnya, kebijkan luar negeri juga turut diartikan sebagai tindakan atau strategi suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain guna mencapai kepentingan negaranya.

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri adalah sebuah tindakan otoritas pemerintah yang dilakukan untuk mempertahankan kepentingan negaranya di lingkungan internasional (Dugis, 2007). Sedangkan menurut Breuning, kebijakan luar negeri adalah totalitas kebijakan negara pada interaksi dengan lingkungan di luar perbatasan suatu negara (Breuning, 2007). Dari penjelasan dua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri berlandaskan pada tujuan nasional suatu negara. Kebijakan luar negeri pada awalnya hanya berupa sebuah *statement* yang apabila ditindak lanjuti akan menjadi kebijakan luar negeri.

Secara sifat kebijakan luar negeri dibagi menjadi dua, kebijakan luar negeri positif dan kebijakan luar negeri negatif. Kebijakan luar negeri positif merupakan kebijakan yang mengarah pada solusi atau perbaikan hubungan diplomatik, seperti kerjasama dan lain sebagainya. Sedangkan kebijakan luar negeri negatif, diartikan sebagai kebijakan yang merespon negara lain dengan membuat hubungan negara tersebut tidak baik, contohnya seperti konflik dan lain-lain. (Varhelyi, 2009).

Kebijakan luar negeri atau *foreign policy* merupakan sebuah instrumen penting suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri juga dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi dengan negara lain dalam berbagai bidang seperti keamanan, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Holsti menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “*National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*” bahwa dalam menganalisa kebijakan luar negeri, terdapat empat sifat dasar dari kebijakan luar negeri. Pertama adalah *Foreign Policy Orientation* yaitu sifat kebijakan luar negeri yang menunjukkan tingkah laku sekaligus komitmen suatu negara pada lingkungan internasionalnya, sehinga mengeluarkan kebijakan yang dianggap sebagai strategi. Hal ini berkaitan erat dengan fokus yang menjadi kepentingan nasional suatu negara yang diimplementasikan dengan kebijakan luar negeri.

Kedua adalah *role*, sifat ini berkaitan dengan bagaimana citra negara dalam menghadapi berbagai kondisi dan isu yang berkembang di lingkungan internasional. Suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh negara akan menunjukkan posisi suatu negara dalam pergaulan internasional.

Ketiga adalah *Goal* yang dapat diartikan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara akan berisi tujuan tertentu demi mengamankan dan mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini menjelaskan pengaruh suatu negara terhadap negara lain menjadi modal penting dalam mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Keempat adalah *action* yang dapat diartikan bahwa kebijakan luar negeri berhubungan dengan aksi yang digunakan sebagai upaya untuk mencapai atau mempertahankan kepentingan nasional (Holsti, 1983). Implikasi dari kepentingan nasional adalah kebijakan luar negeri, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah perpanjangan tangan dari kepentingan nasional. Namun, kebijakan luar negeri tidak hanya direalisasikan dengan tindakan, kecaman dan kritikkan sudah bisa dianggap sebagai kebijakan luar negeri.

Berdasarkan pemaparan dari Holsti, menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor internal yakni kepentingan nasional berupa ekonomi dan keamanan, faktor eksternal seperti keadaan politik internasional. Kedua, faktor ini harus dapat dikondisikan dengan baik sehingga terciptalah kebijakan luar negeri yang sesuai.

### Sekuritisasi

Dalam buku “*Security A New Framework for Analysis”* konsep sekuritisasi dibahas oleh Barry Buzan dkk. Dalam bukunya ini, Buzan merasa isu keamanan harus mengalami perluasan untuk mencakup ancaman yang bersifat militer dan non-militer, hal ini bertujuan agar keamanan dapat relevan untuk negara maju dan negara berkembang sekalipun (Hadiwinata, 2017). Pada awal bukunya Buzan menjelaskan terlebih dahulu mengenai keamanan., ia menjelaskan bahwa dalam konteks hubungan internasional, keamanan dapat dibilang pendekatan yang tradisional dan lebih relevan dalam membahas politik-keamanan. Buzan pun menyebutkan bahwa pemerintah dapat mendeklarasikan keadaan darurat yang memberikan hak kepada negara untuk melakukan segala cara untuk menghentikan perkembangan ancaman tersebut, dan negara berhak untuk menggunakan segala instrumen dan memobilisasi kekuatan hingga menggunakan kekuatan spesial (Buzan, Waver, & Wilde, 2013) hal 21.

Atas dasar isu keamanan, pemerintah dapat mengambil langkah politik yang ekstrem, sekalipun itu menyalahi aturan yang berlaku. Studi sekuritisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai; siapa yang men-sekuritisasi, dalam ancaman apa, untuk siapa (objek referensi), dalam kondisi apa, mengapa dan dengan hasil apa (Buzan, Waver, & Wilde, 2013) hal 32. Dalam bukunya Buzan menggambarkan proses sekuritisasi sebagai berikut; sebuah isu dianggap sebagai *existential threat*, lalu memunculkan *emergency response* dan justifikasi atas tindakan yang diambil, dan yang terakhir adalah *speech act* yang dilakukan oleh *securitizing actor*.

*Existential threat* yang dimaksud oleh buzan disini, yang berhubungan dengan keamanan. Dalam praktiknya, konsep keamanan memiliki sifat *self-referential.* Sehingga sebuah ancaman akan menjadi ancaman apabila memang disajikan sebagai isu. Hal ini membuat isu keamanan menjadi isu prioritas dan harus mendapatkan perhatian lebih karena jauh lebih penting dari isu lainnya. Setiap sektor seperti militer, ekonomi, politik, sosial dan lingkungan memiliki *existentian threats* nya masin-masing (Buzan, Waver, & Wilde, 2013: 22)

Adanya *emergency responses* dan justifikasi atas tindakan yang diambil untuk menangani *existential threats.* Ketika *securitizing actor* mengumumkan *existential threats,* maka mereka memiliki justifikasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat luar biasa yang bahkan berlawanan dengan peraturan, norma dan kebijakan politik yang sedang berlaku, contohnya sepeti merahasiakan sesuatu, memungut pajak atau menerapkan pembatasan-pembatasan untuk warga negaranya dan lain sebagainya. Usaha aktor dalam membawakan sebuah isu untuk menjadi *existential move* disebut juga sebagai *securitizing move*, yang dapat diartikan sebgai tindakan yang diambil untuk menjustifikasi agar ancaman yang dimaksud tidak berkembang (Buzan, Waver, & Wilde, 2013) hal 21-25.

Jef Huysmans menyebutkan hal yang serupa mengenai sekuritisasi. Dalam bukunya yang berjudul “*The Politics of Insecurity, Migration & Asylum In the EU”* ia membahas mengenai konsep sekuritisasi migrasi. Huysmans memaparkan mengenai pembingkaian keamanan terkait migran, ia menjabarkan tentang mengapa migran dianggap sebagai ancaman, dan dalam bentuk apa saja respons yang dikeluarkan untuk migran (Huysmans, 2005).

Sekuritisasi terhadap pengungsi dan migran bergantung pada klaim yang menyebutkan bahwa mereka merupakan sebuah ancaman bagi suatu unit politik. Hal ini dapat dinilai dari peningkatan jumlah migran yang masuk ke suatu negara secara drastis, peningkatan ini tentu dapat memicu meningkatnya angka penganguran, mengancam kestabilan sosial dan permasalahan-permasalahan lainnya. Selain melihat peningkatan jumlah migran yang secara drastis, argumen sekuritisasi juga dapat dilihat dari karakteristik migran dan pengungsi yang masuk. Seperti perbedaan budaya antara migran dan warga lokal, hal tersebut dapat menimbulkan kegelisahan di masyarakat yang berujung pada berkurangnya legitimasi dari pemerintah karena para migran menerapkan nilai dan norma yang berbeda dari warga lokal (Huysmans, 2005: 47).

Huysmans menyebutkan terdapat tiga karakteristik dari bagaimana keamanan mengontrol migran, pertama penyebaran rasa takut dan kepercayaan, yang kedua adanya proses inklusi dan pengucilan, dan yang terakhir adanya alienasi dan penggunaan kekerasan.

Pertama, mengenai penyebaran rasa takut dan kepercayaan. Keamanan melihat hubungan antar-manusia diatur berdasarkan dengan membedakan mana yang dapat dipercaya dan mana yang harus ditakuti. Berdasarkan hal ini, migran tidak memiliki kapabilitas untuk berasimilasi secara politik dengan kelompok tertentu, karena mereka pasti ditakuti. Stigma terhadap migran atau orang tidak dikenal yang dianggap berbahaya membuat rasa takut ini dianggap merugikan. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung memberikan kepercayaan untuk sebuah neara dalam menutup perbatasan, menghalangi migran untuk masuk, mengontrol para pengungsi atau migram dan yang paling ekstrim adalah mengusir para migran atau pengungsi (Huysmans, 2005: 51).

Kedua, proses inklusi dan pengucilan terhadap migran atau pengungsi. Dalam hal ini, migran atau seorang pengungsi harus dilihat sebagai ancaman, sehingga harus dibuat menjauh dari kelompok tertentu. Seperti peningkatan kontrol di wilayah perbatasan yang akhirnya membuat migran dan pengungsi sulit untuk masuk ke negara tersebut. Penguncian pengungsi atau migran ke dalam kamp konsentrasi atau *detention centre* merupakan cara lain yang dapat dilakukan, hal ini bertujuan untuk melakukan proses integrasi antara migran atau pengungsi dengan nilai atau norma-norma yang berlaku di wilayah tersebut, sehingga tidak ada lagi perbedaan budaya, nilai dan norma dan pada akhirnya menimbulkan rasa aman bagi masyrakat atau kelompok tersebut. Langkah terakhir adalah dengan mengusir migran atau pengungsi tersebut setelah permintaan suaka mereka ditolak (Huysmans, 2005) Hal. 54-57.

Ketiga, proses alienasi dan penggunaan kekerasan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa antara migran atau pengungsi denga kelompok setempat memiliki adanya perbedaan. Berdasarkan hal tersebut, hubungan antara keduanya sulit untuk terjadi, dan justru mengakibatkan migran dan pengungsi terbuka untuk tindak kekerasan. Hal ini terjadi karena tujuan dari sekuitisasi adalah untuk menjauhkan kelompok tertentu dengan kelompok lainnya (Huysmans, 2005) Hal. 57.

## 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis atau juga disebut anggapan dasar yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah “**Besarnya arus pengungsi asal Suriah ke Hungaria, memunculkan suatu strategi pemerintah yang mengarah pada penolakan terhadap masuknya pengungsi asal suriah”**

## 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Dalam membantu menganalisan penelitian ini lebih lanjut, penulis membuat Verifikasi Variabel dan Indikator agar penulis dapat melakukan verifikasi atau pembuktian terhadap hipotesis yang sudah penulis buat, dengan tolak ukur berdasarkan konsep teoritik. Verifikasi variabel dan indikator pembentukkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Verifikasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel Dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| **Variabel Bebas :**  “**Jika pengungsi di Eropa meningkat”** | 1. Jumlah pengungsi yang datang ke Eropa meningkat hingga 44% | 1. “Jumlah peminta suaka ke negara-negara Uni Eropa melonjak 44 persen tahun lalu dan mencapai sekitar 626.000.”   <https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-pencari-suaka-ke-uni-eropa-melonjak-44-persen-pada-2014/2690131.html> |
| **Variabel Terikat :**  **“Maka penolakkan merupakan kebijakan luar negeri Hungaria dalam menjaga stabilisasi keamanan”** | 1. Penolakkan pengungsi untuk menjaga kestabilan keamanan Hungaria | 1. “Hungaria mengatakan bahwa para imigran mengancam keamanan nasional mereka, namun sikap garis keras dan peraturan baru mereka mendapat kecaman internasional secara meluas”   <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44574066>   1. “Hungaria mendirikan pagar di perbatasan selatan negara itu tahun 2015 untuk menghentikan arus migran dan pengungsi. Perdana Menteri Viktor Orban berulangkali mengatakan bahwa besarnya arus migran yang sebagian besar Muslim membahayakan budaya Eropa”.   <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-minta-hongaria-melonggarkan-kebijakan-pengungsi/4026552.html> |
|  |  |  |

## 2.5 Skema dan Alur Pemikiran

Krisis Pengungsi di Eropa

Pengungsi Asal Suriah di Eropa

Stabilitas Keamanan Hungaria

Kebijakan Hungaria

Sikap Hungaria